

FORMAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹

²

**PERNYATAAN
BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | | |
|-------------------------------|---|-------|---|
| Nama | : | | 3 |
| Jabatan | : | | 4 |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | | 5 |
| Alamat | : | | 6 |
| Telepon/Fax. | : | | 6 |
| E-mail | : | | 7 |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam **Pasal 18** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun **2007** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,⁸ bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....,⁹

SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....



.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

Keterangan:

¹ diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota

² diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

³ diisi nama lengkap.

⁴ diisi jabatan selaku pimpinan SKPD/ Unit Kerja.

⁵ diisi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.

⁶ diisi nomor telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.

⁷ diisi e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD).

⁸ diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD).

⁹ diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. MARDIYANTO

PERWIRA